

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Myanmar atau lebih dikenal dengan *Republic of Myanmar*, sebelumnya bernama *Union of Myanmar* merupakan salah satu negara yang belum menjalankan pemerintahan demokratis di Asia Tenggara sampai tahun 2011 setelah diperintah oleh rezim junta militer Tatmadaw sejak tahun 1962. Pemerintahan militer Myanmar dimulai sejak kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win. Munculnya kekuatan militer dalam sistem politik Myanmar menggeser pelaksanaan sistem demokrasi parlementer yang telah diterapkan di Myanmar sejak kemerdekaannya dari Inggris tanggal 4 Januari 1948.<sup>1</sup>

Semenjak adanya peralihan kekuasaan kepada militer ini, seluruh aspek kehidupan yang ada di Myanmar diambil alih oleh militer baik dari segi politik, pemerintahan dan ekonomi. Pendapat ini dikemukakan oleh Davis I. Steinberg yang menyebut Myanmar sebagai *the most monolithically military-controlled in the world*. Hal ini disebabkan kondisi pemerintahan Myanmar yang sangat dikendalikan oleh militer sejak tahun 1962.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan pemerintahannya, junta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win membuat Myanmar cenderung menutup diri dari pihak asing sesuai dengan kebijakan isolasi yang diterapkannya. Pemerintah militer juga menerapkan ideologi sosialisme dengan istilah *Burmese Way to Socialism* sebagai dasar bagi sistem politik dan ekonomi. Selain itu, pemerintah hanya mengakui

---

<sup>1</sup>Tom Kramer, "Ending 50 years of Military Rule? Prospects for Peace, Democracy and Development in Burma" (Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF) Report, November 2012), hal 1-4

<sup>2</sup> M. Adian Firnas, "Prospek Demokrasi di Myanmar", *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol.2 No.2 (2003) : hal 130-131

adanya satu partai politik yang bernama *Burmese Socialist Program Party* (BSPP) atau Partai Lenzin dengan mayoritas anggotanya adalah golongan militer serta menghapus semua partai oposisi yang ada di negaranya.<sup>3</sup>

Kendali penuh militer dalam politik juga terlihat pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1990. Pemilu tersebut diadakan oleh pemerintah Myanmar untuk meredam aksi demonstrasi yang terjadi tahun 1988 dan untuk menanggapi surat terbuka yang disampaikan oleh Aung San Suu Kyi, tokoh demokratisasi Myanmar pada tanggal 15 Agustus 1988. Aung San Suu Kyi dan tokoh pro demokrasi lainnya lalu membentuk sebuah partai yang bernama *National League for Democracy* (NLD). Mereka melakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Myanmar yang juga menginginkan perubahan dalam sistem perpolitikan di negaranya. Hasilnya partai NLD memperoleh suara sebesar 80,82 persen dan menang mutlak atas partai *State Law and Order Restoration Council* (SLORC) pemerintah junta militer. Pemerintah junta militer mengabaikan hasil pemilu dan malah melakukan penahanan terhadap Aung San Suu Kyi dan beberapa tokoh pro demokrasi lainnya. Mereka dianggap sebagai pemberontak dan penyebab dari ketidakstabilan politik yang terjadi di Myanmar.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam bidang ekonomi, kendali pemerintah junta militer terlihat dalam pengambilan keputusan ekonomi tanpa memperhatikan nasib rakyat Myanmar. Pada tahun 1998 pemerintah junta mengeluarkan kebijakan mengenai penurunan nilai mata uang yang menyebabkan uang kertas bernilai besar tidak

---

<sup>3</sup> Hnin Yi, "The Political Role of the Military in Myanmar" (Ritsumeikan Center for Asia Pacific Studies (RCAPS) Working Paper, Asia Pacific University, 17 Januari 2014), hal 10-11

<sup>4</sup> Rani Anggia Puspita, "Peranan Aung San Suu Kyi dalam Memperjuangkan Demokrasi di Myanmar Tahun 1988-2012"(Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), hal 3-4

berlaku lagi. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat Myanmar kehilangan tabungan yang mereka miliki. Akibat peristiwa tersebut masyarakat Myanmar mulai melakukan protes melalui demonstrasi yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1998. Demonstrasi ini juga disebabkan oleh ketidakpuasaan masyarakat terhadap pemerintah Myanmar yang dinilai gagal dalam memimpin Myanmar dan adanya keinginan dari masyarakat untuk melakukan perubahan sistem pemerintahan menuju sistem demokrasi. Demonstrasi ini menyebabkan 3000 demonstran tewas akibat tindakan pemerintah junta yang melakukan kekerasan dan tindakan represif kepada mereka, peristiwa ini dikenal dengan sebutan *Uprising 8888*.<sup>5</sup>

Selanjutnya pada tahun 2007, peristiwa serupa juga kembali terjadi akibat kebijakan yang diambil oleh pemerintah Myanmar yang mencabut subsidi terhadap impor diesel dan gas alam yang biasanya digunakan untuk transportasi dan listrik oleh masyarakat yang menyebabkan kenaikan harga mencapai 500%. Masyarakat Myanmar kembali melakukan demonstrasi untuk memprotes kebijakan ini. Para biksu yang terlibat dalam demonstrasi ini diserang secara brutal dengan mengikat mereka pada tiang, lalu memukul serta melepaskan jubah yang mereka pakai.<sup>6</sup>

Pengendalian penuh militer dalam segala aspek kehidupan yang banyak merugikan masyarakat, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah junta militer dan penangkapan tokoh-tokoh pro demokrasi akibat pemilu tahun 1990 menimbulkan kemarahan dunia internasional. Banyak sanksi yang diberikan oleh

---

<sup>5</sup> Mohamad Faisol Keling et al, "A Historical Approach to Myanmar's Democratis Process", *Journal of Asia Pacific Studies*, Vol 1 No 2 (2010) : hal 141-142.

<sup>6</sup> Priscilla Clapp, "Burma's Long Road to Democracy" (Special Report 193, United States Institute of Peace, November 2007), hal 2-3

dunia internasional sejak tahun 1998 kepada Myanmar. Sanksi tersebut misalnya berupa penghentian semua bantuan dan pinjaman kepada pemerintah Myanmar yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Embargo senjata dan ekonomi juga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa.<sup>7</sup> Bahkan Uni Eropa melakukan isolasi politik melalui pelarangan pemberian visa terhadap pejabat-pejabat pemerintah Myanmar untuk melakukan kunjungan ke Uni Eropa.<sup>8</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) juga melakukan tekanan melalui pendekatan diplomatik agar pemerintah Myanmar mau menyadari kekejaman yang telah mereka lakukan terhadap rakyatnya sehingga ingin membuka diri untuk menerapkan demokrasi di negaranya. ASEAN memulai dengan sebuah kebijakan yang bernama *constructive engagement*<sup>9</sup> dan PBB melakukan kunjungan ke Myanmar yang diwakili oleh Profesor Sadako Ogata, seorang sarjana dan diplomat dari Jepang yang dikirim pada tahun 1990 sebagai perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang melakukan pendekatan diplomatik agar pemerintah Myanmar bersedia untuk lebih menghormati HAM dan memberikan kebebasan dasar bagi rakyatnya.<sup>10</sup>

Dunia internasional menginginkan agar Myanmar merubah sistem pemerintahannya menuju pemerintahan demokratis. Hal ini didasarkan pada

<sup>7</sup> Zunetta Liddell, "International Policies towards Burma: Western Governments, NGOs and Multilateral Institutions," (International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2001), hal 135

<sup>8</sup> Ravi Mirza Fitri, "Dukungan India terhadap Junta Militer Myanmar (2004-2009) : Kerjasama Ekonomi dan Rivalitas dengan China," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional Universitas Airlangga*, Vol 3 No 1 : hal 530

<sup>9</sup> Kebijakan *Constructive Engagement* merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh ASEAN untuk melakukan perlibatan ASEAN dalam mendorong demokratisasi di Myanmar yang dikeluarkan pada tahun 1991. Inti kebijakan ini kemudian adalah upaya untuk membantu menyelesaikan persolan internal Myanmar dengan cara-cara ASEAN (ASEAN's way) tanpa harus menggunakan kekerasan, yaitu menyelesaikan permasalahan secara persuasif dengan melakukan promosi demokrasi tanpa menggunakan kekuatan militer ataupun embargo untuk mengisolasi Myanmar.

<sup>10</sup> Anna Magnusson and Morten B. Pedersen, *A Good Office? Twenty Years of UN Mediation in Myanmar* (New York: International Peace Institute, 2012), hal 6

anggapan bahwa sistem demokrasi dianggap sebagai sistem yang paling baik dan merupakan solusi terbaik bagi sistem sosial dan politik yang ada di dalam masyarakat karena meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan praktek-praktek demokrasi.<sup>11</sup> Sistem demokrasi juga mengakui adanya hak dasar kewarganegaraan untuk mendapatkan kebebasan, persamaan, transparansi, tanggung jawab dan saling menghormati perbedaan pendapat yang ada dalam masyarakat demi keberlangsungan pemerintahan.<sup>12</sup>

Setelah diperintah lebih dari 40 tahun oleh militer, pemerintah Myanmar akhirnya mengungkapkan keinginannya untuk mulai menerapkan sistem demokrasi dalam negaranya melalui sebuah kebijakan yang bernama *Seven Steps Roadmap to Discipline-Flourishing Democracy*. Kebijakan ini merupakan salah satu program politik yang disampaikan oleh Perdana Menteri Khin Nyunt pada pertemuan di gedung *Pyithu Hluttaw* pada tanggal 30 Agustus 2003. Ketujuh langkah dalam menciptakan pemerintahan demokratis tersebut adalah :<sup>13</sup>

1. Kembali mengadakan Konvensi Nasional yang telah diberhentikan sejak tahun 1996.
2. Setelah Konvensi Nasional ini sukses diadakan, pemerintah akan menerapkan langkah demi langkah proses yang diperlukan untuk diadakannya sistem demokrasi yang sejati dan disiplin.
3. Penyusunan Konstitusi baru yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dihasilkan oleh Konvensi Nasional.

---

<sup>11</sup>Janelle M. Diller, "The National Convention in Burma (Myanmar): An Impediment to the Restoration of Democracy," <http://www.ibiblio.org/obl/docs/LHR-Diller3.html>, (diakses 25 Agustus 2015)

<sup>12</sup>Inter-Parliamentary Council, *Universal Declaration on Democracy* (Cairo: Inter-Parliamentary Council, 1997), hal IV

<sup>13</sup>The New Light of Myanmar, "Prime Minister General Khin Nyunt clarifies future policies and programmes of State," <http://www.networkmyanmar.com/images/kn2003.pdf>, (diakses pada 7 September 2015)

4. Mengadopsi konstitusi ini sebagai awal dari referendum nasional.
5. Mengadakan pemilihan legislatif (*Pyithu Hluttaw*) yang bebas dan adil sesuai dengan konstitusi baru.
6. Diselenggarakannya rapat *Hluttaws* yang dihadiri oleh anggota *Hluttaw* sesuai dengan konstitusi baru.
7. Membangun negara modern, maju dan demokratis yang dipimpin oleh seorang kepala negara yang dipilih oleh *Hluttaw* yang didukung oleh pemerintah dan organ penting lainnya yang juga akan dibentuk oleh *Hluttaw* tersebut.

Konsep *Discipline Democracy* berasal dari kata disiplin yang berarti mematuhi aturan dengan segala pengecualian dan larangan yang termuat di dalamnya. Dalam bidang militer kata disiplin biasanya digunakan untuk melakukan kontrol terhadap anggotanya dan untuk mempertahankan keteraturan yang ada, sedangkan demokrasi memberikan kebebasan dan HAM kepada seluruh masyarakatnya. Jadi, *Discipline Democracy* berarti kebebasan dan HAM yang diberikan kepada masyarakat akan berada di bawah kontrol dan dalam kasus Myanmar pemegang kontrol tersebut adalah militer.<sup>14</sup>

Konsep *Discipline Democracy* di Myanmar dimulai sejak tahun 1988 ketika kekuasaan di Myanmar dikuasai oleh partai SLORC. Pada saat itu Perdana Menteri Aung San mengemukakan bahwa “*Anda perlu kedisiplinan penuh untuk dapat menikmati kehidupan demokrasi secara menyeluruh*”. Kedisiplinan tersebut pada akhirnya berdampak pada regulasi dan peraturan yang ketat dalam bidang ekonomi, politik, budaya sejarah dan identitas negara. Guna memantapkan penerapan konsep *Disciplined Democracy*, Khin Nyunt kemudian mempelajari

---

<sup>14</sup> “What Is Meant by Disciplined Democracy?,” <http://monnews.org/2010/10/27/what-is-meant-by-disciplined/democracy/> (diakses 1 April 2016).

mengenai isi dan bagaimana konsep Dwi Fungsi ABRI dijalankan di Indonesia. Pada tahun 1993 dia mengunjungi Indonesia dan mulai memperdalam tentang konsep Dwi Fungsi ABRI tersebut. Khin Nyunt lantas menjadikan Dwi Fungsi ABRI sebagai acuan pokok penerapan *Disciplined Democracy* di Myanmar yang mana militer tidak hanya sebagai sebuah institusi pertahanan negara, namun juga berpartisipasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.<sup>15</sup>

Tulisan yang ditulis oleh *Alternative ASEAN Network on Burma* (ALTSEAN BURMA)<sup>16</sup> mengungkapkan bahwa kebijakan *seven steps roadmap to discipline-flourishing democracy* dibuat dan dirancang oleh pemerintah Myanmar sebagai upaya untuk mengurangi tekanan dari masyarakat internasional tanpa harus melepaskan Auang San Suu Kyi dan pemimpin NLD lainnya yang mendukung penerapan demokrasi Myanmar.<sup>17</sup>

Kebijakan *seven steps roadmap to discipline-flourishing democracy* ini juga dinilai banyak pihak hanya sebagai upaya militer dalam upaya untuk tetap mempertahankan posisinya dalam pemerintah dan meredam tekanan dari masyarakat dan dunia internasional. Hal ini didasarkan pada kendali penuh militer dalam menjalankan penerapan kebijakan tersebut. Walaupun menimbulkan banyak kontra dalam pelaksanaannya, akhirnya pada tanggal 4 Februari 2011, Presiden Thein Sein diangkat sebagai presiden sipil pertama Myanmar oleh Parlemen Myanmar setelah kemenangan partai *Union Solidarity and Development*

---

<sup>15</sup> Bart Gaens, hal 10-11

<sup>16</sup> ALTSEAN Burma merupakan sebuah organisasi network yang berbasis di negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk mendukung gerakan HAM dan demokrasi di Myanmar. ALTSEAN Burma ini beranggotakan pakar HAM, LSM, partai politik, akademisi, wartawan dan aktivis mahasiswa yang terbentuk di Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand pada Oktober 1996.

<sup>17</sup> Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN BURMA), "Burma Briefing: Issues and Concerns Volume 1," (Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN BURMA), (November 2004) : hal 38-40

*Party* (USDP) pada pemilu yang diadakan pada tahun 2010. Pemerintahan sipil ini secara resmi dilantik pada tanggal 30 Maret 2011 dan menandai berakhirnya pemerintahan junta militer di Myanmar.<sup>18</sup>

Meskipun Presiden Thein Sein merupakan bekas mantan jenderal kepercayaan Presiden Than Shwe yang sebelumnya memerintah Myanmar dan juga terlibat dalam tindakan kekerasan pada tahun 1988<sup>19</sup>. Setelah terpilih sebagai presiden, Thein Sein menunjukkan keseriusannya dengan melakukan reformasi dibidang politik dan ekonomi di negara Myanmar. Perubahan-perubahan tersebut misalnya keterbukaan negara Myanmar bagi dunia internasional, pembebasan tahanan politik, pelonggaran sensor media dan kebebasan penggunaan internet, pembentukan Komisi HAM Nasional, kebebasan bagi buruh untuk berserikat dan melakukan liberalisasi ekonomi dengan memprioritaskan pada industrialisasi dan perbaikan infrastruktur pendukung perekonomian. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk untuk menjadikan Myanmar sebagai negara yang lebih demokrasi, sejahtera, maju dan menghormati HAM.<sup>20</sup>

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana demokratisasi yang terjadi di Myanmar pada tahun 2003-2011.

---

<sup>18</sup>Devi Apriyanti, "Reformasi Politik dan Ekonomi di Myanmar pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013)", Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau, Vol.1 No.2 (Oktober 2014) : hal 2

<sup>19</sup> Bart Gaens, "Political Change in Myanmar : Filtering the Murky Waters of "Disciplined Democracy", Kruunuvoorenkatu 4, The Finnish Institute of International Affairs, (Februari 2013) : hal 9

<sup>20</sup> Robert H.Taylor, "Myanmar : from Army Rule to Constitutional Rule?", Jurnal Asian Affairs, Vol. XLIII, No. II ( July 2012) : hal 222

## 1.2 Rumusan Masalah

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang belum menerapkan pemerintahan demokratis dan menjadi negara terlama yang dikuasai oleh militer sejak tahun 1962. Selain itu, Myanmar juga mempunyai catatan buruk dalam pelanggaran HAM sehingga mendapat tekanan dari dunia internasional. Namun pada tanggal 30 Agustus 2003 di gedung *Pyithu Hluttaw*, Perdana Menteri Khin Nyut mengumumkan sebuah kebijakan bernama *seven steps roadmap to discipline-flourishing democracy* dalam upaya mewujudkan demokrasi di Myanmar. Hal ini tentu mengejutkan dan banyak pihak yang berpendapat kalau ini hanya sebagai upaya militer untuk tetap memegang kekuasaan dalam pemerintahan Myanmar. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana demokratisasi yang terjadi di Myanmar dari tahun 2003-2011.

## 1.3 Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah “Bagaimana demokratisasi yang terjadi di Myanmar tahun 2003-2011?”

## 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana demokratisasi yang terjadi di Myanmar tahun 2003-2011.

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan mengenai demokratisasi Myanmar terutama mengenai demokratisasi yang terjadi di Myanmar tahun 2003-2011.

2. Penelitian ini bermanfaat sebagai proses pembelajaran bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang didapatkan dalam menganalisis bagaimana demokratisasi yang terjadi di Myanmar tahun 2003-2011.

### 1.6 Studi Pustaka

Studi pustaka pada dasarnya digunakan sebagai pembandingan terhadap suatu penelitian yang telah dibuat dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari pembandingan ini agar nantinya bisa menambah informasi yang di dapat dan dapat menghindari terjadinya pengulangan terhadap suatu penelitian.

**Pertama**, penulis merujuk pada *working paper* yang ditulis oleh Marco Bünte yang berjudul *Burma's Transition to "Disciplined Democracy" : Abdication or Institutionalization of Military Rule?* yang menjelaskan mengenai teori tentang intervensi militer ke dalam politik dan faktor-faktor penyebab militer mundur dari pemerintahan. Tulisan ini menjadikan Myanmar sebagai contoh dari penelitiannya.<sup>21</sup>

Tatmadaw (militer Myanmar) telah terlibat dalam politik sejak kemerdekaan Myanmar dari negara Inggris. Militer Myanmar dianggap sebagai sebuah kekuatan yang memperjuangkan kemerdekaan Myanmar dan berperan sebagai penjaga dan benteng pertahanan negara. Walaupun di awal kemerdekaannya, konsitusi 1947 mengisyaratkan pendirian sebuah sistem pemerintahan demokratis, namun peran militer berangsur-angsur mulai meluas dalam perpolitikan, dimulai dengan keberhasilan militer menyelesaikan konflik etnik dan meredam pemberontakan komunis yang disertai dengan modernisasi dalam kekuatan

---

<sup>21</sup>Marco Bünte, "Burma's Transition to "Disciplined Democracy" : Abdication or Institutionalization of Military Rule?," Jerman, German Institute of Global and Area Studies Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien (GIGA) (Agustus 2011) : hal 1-31

militer. Kudeta militer yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win berhasil merebut kekuasaan dari tangan sipil.

Tulisan ini selanjutnya menjelaskan tentang faktor internal dan eksternal yang menyebabkan penarikan diri militer dari pemerintahan. Faktor-faktor ini dikemukakan oleh Ulf Sundhaussen dan Aurel Croissant. Faktor internal mencoba menjelaskan bagaimana dinamika hubungan dalam organisasi internal militer yang menyebabkan militer harus menarik diri dari pemerintahan. Dalam kasus Myanmar, modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar ternyata berdampak buruk bagi kesatuan militer. Modernisasi angkatan bersenjata menyebabkan personil militer terbagi-bagi dalam beberapa faksi. Hal ini juga diperparah dengan perpecahan dalam partai SPDC partai yang berkuasa pada saat itu.

Sedangkan faktor eksternal menjelaskan bagaimana tekanan-tekanan yang berasal dari luar organisasi militer yang menuntut militer untuk mundur dari pemerintahan. Dalam kasus Myanmar misalnya dengan kemunculan NLD sebagai partai oposisi yang mampu memenangkan pemilu tahun 1990 dan gerakan mahasiswa sejak tahun 1988 sampai tahun 2007 yang selalu berakhir dengan tindakan represif pemerintah yang menyebabkan kematian, penangkapan dan pemenjaraan. Pemberontakan etnis yang kembali terjadi tahun 1988 juga menjadi salah satu faktor militer menarik diri dari pemerintahan.

**Kedua**, dalam *The Finnish Institute of International Affairs Working Paper* yang ditulis oleh Bart Gaens yang berjudul *Political Change in Myanmar : Filtering the Murky Waters of “Disciplined Democracy”*.<sup>22</sup> Bart Gaens

---

<sup>22</sup>Bart Gaens, hal 1-29

berpendapat bahwa transformasi rezim menuju pemerintahan sipil yang dilakukan pemerintahan junta militer Myanmar hanya digunakan untuk mempertahankan posisinya dalam pemerintahan di masa yang akan datang. Militer menyadari bahwa tidak adanya kestabilan dalam pemerintahan otoriter dalam waktu yang lama. Pemimpin militer berusaha untuk mencari jalan keluar dan mengalah untuk pembentukan pemerintahan sipil tapi setelah melindungi kepemilikan pribadi, kepentingan komersil dan memenuhi kebutuhan pihak militer. Para jenderal militer akan menjamin jika mereka menyerahkan kekuasaan, para jenderal dan keluarga mereka akan tetap memiliki asset yang tidak dapat dituntut oleh siapapun serta penghindaran dan pembebasan dari hukuman akibat kejahatan yang mereka lakukan pada masa pemerintahan otoriter.

**Ketiga**, dalam jurnal yang ditulis oleh Robert H. Taylor yang berjudul *Myanmar : From Army Rule to Constitutional Rule?* menjelaskan mengenai reformasi dalam pemerintahan di Myanmar setelah disahkannya konstitusi baru tahun 2008.<sup>23</sup> Dalam pidato Presiden Myanmar, Thein Sein yang menjabat sejak 30 Maret 2011 menyatakan keterbukaan negara Myanmar secara luas bagi dunia internasional, penghapusan sensor media dan kebebasan penggunaan internet, hukum yang mengatur mengenai kebebasan dan hak berserikat buruh dan demonstrasi dalam masyarakat, alokasi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat dan mengurangi anggaran untuk militer serta peningkatan alokasi anggaran belanja negara pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Selanjutnya, Pemerintah Myanmar juga akan melepaskan tahanan politik yang ditangkap akibat keikutsertaan dalam aksi protes melawan pemerintah junta

---

<sup>23</sup> Robert H. Taylor, hal 221- 236

pada tahun 1988, 1996, 2007 dan 2008 serta keinginan Presiden Thein Sein untuk mengurangi masalah kemiskinan di Myanmar, penyelesaian masalah korupsi dan pemborosan anggaran belanja Negara, penyelesaian konflik bersenjata dan perselisihan antar etnik dan pembangunan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk melindungi kesatuan dan kedaulatan negara. Kekuatan politik dapat diwujudkan apabila masyarakat secara bersama-sama mau menerima *seven road map to democracy* dan konstitusi baru yang telah diterapkan di negara Myanmar.

**Keempat**, dalam chapter ke-10 dari buku *Democratization : A Critical Introduction* yang ditulis oleh Jean Grugel yang berjudul *Democratization in Asia* menjabarkan mengenai teori demokratisasi di Asia dan dinamika demokratisasi yang terjadi di beberapa negara di Asia misalnya Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan.<sup>24</sup> Gelombang demokratisasi di Asia dimulai sekitar tahun 1980-an, dimana sebelum tahun 1980-an negara-negara di Asia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara-negara di Barat. Pemerintahan di negara-negara Asia menekankan pada kontrol kuat negara dalam membentuk dan mengarahkan pasar dan perusahaan-perusahaan nasional.

Demokratisasi di negara-negara Asia ini biasanya dimulai dengan munculnya gerakan-gerakan pro demokrasi dari kelompok oposisi yang tidak menginginkan pemerintahan otoriter diterapkan di negaranya. Kelompok oposisi ini melakukan protes terhadap sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka mengalami penindasan dari pemerintah yang berkuasa. Meskipun demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok oposisi ini biasanya menemui hasil dengan dilaksanakannya pemilu walau masih dikontrol secara ketat oleh

---

<sup>24</sup>Jean Grugel, *Democratization : A Critical Introduction*, ( New York : Palgrave, 2002), hal 217-237

pemerintah yang berkuasa. Beberapa gambaran demokratisasi negara-negara di Asia ini bisa dijadikan acuan bagi penulis untuk menggambarkan bagaimana dinamika yang terjadi di Myanmar dalam mewujudkan pemerintahan demokratis.

**Kelima**, dalam artikel yang ditulis oleh Zunetta Liddell yang berjudul “*International Policies Toward Burma : Western Governments, NGOs and Multilateral Institutions*” dalam jurnal *Challenges to Democratization in Burma Perspectives on Multilateral and Bilateral Responses*<sup>25</sup> menjelaskan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Barat, lembaga-lembaga multilateral dan *Non Government Organizations* (NGOs) dalam melakukan pendekatan untuk mendesak pemerintah Burma untuk melakukan transisi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar yang sudah dimulai sejak tahun 1999. Desakan terhadap pemerintah Myanmar ini dimulai dengan terjadinya penyerangan terhadap demonstran pada tahun 1988 yang menyebabkan ribuan orang meninggal dan penderitaan oposisi yang dilambungkan oleh Aung San Suu Kyi yang ditahan oleh pemerintah Myanmar akibat pemilu tahun 1990.

Dari pemaparan pada studi pustaka di atas, tulisan pertama yang ditulis oleh Marco Bunte menjelaskan mengenai intervensi militer kedalam politik Myanmar,, militer dianggap sebagai sebuah kekuatan yang memperjuangkan kemerdekaan Myanmar dan berperan sebagai penjaga dan benteng pertahanan Negara. Tulisan ini juga menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab militer mundur dari pemerintahan. Faktor internalnya disebabkan oleh modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar ternyata berdampak buruk bagi kesatuan militer, sedangkan faktor eksternalnya disebabkan oleh kemunculan NLD sebagai partai

---

<sup>25</sup> Zunetta Liddell, “International Policies towards Burma: Western Governments, NGOs and Multilateral Institutions,” International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) (2001) : hal 131-181.

oposisi yang mampu memenangkan pemilu tahun 1990 dan gerakan mahasiswa sejak tahun 1988 sampai tahun 2007. Tulisan kedua yang ditulis oleh Bart Gaens menjelaskan bahwa transformasi rezim yang dilakukan pemerintahan junta militer Myanmar hanya digunakan untuk mempertahankan posisinya dalam pemerintahan di masa yang akan datang.

Tulisan ketiga yang ditulis oleh Robert H. Taylor menjelaskan mengenai reformasi dalam pemerintahan di Myanmar setelah disahkannya konstitusi baru tahun 2008. Pemerintahan Thein Sein yang dipilih sesuai dengan konstitusi mulai melakukan beberapa perubahan dalam negara Myanmar, yaitu keterbukaan negara Myanmar secara luas bagi dunia internasional, penghapusan sensor media dan kebebasan penggunaan internet, hukum yang mengatur mengenai kebebasan dan hak berserikat buruh dan demonstrasi dalam masyarakat, alokasi sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat dan mengurangi anggaran untuk militer serta peningkatan alokasi anggaran belanja negara pada sektor kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya, Pemerintah Myanmar juga akan melepaskan tahanan politik yang ditangkap

Kemudian tulisan keempat yang ditulis oleh Jean Grugel menjabarkan dinamika demokratisasi yang terjadi di beberapa negara di Asia misalnya Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan sebagai acuan dalam menggambarkan bagaimana dinamika yang terjadi di Myanmar dalam mewujudkan demokrasi. Terakhir tulisan kelima yang ditulis oleh Zunetta Liddell menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Barat, lembaga-lembaga multilateral dan NGOs dalam mendesak pemerintah Burma untuk melakukan transisi demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia di Myanmar. Sedangkan tulisan ini akan

menjelaskan mengenai demokratisasi yang terjadi di Myanmar dari tahun 2003 hingga terbentuknya pemerintahan sipil tahun 2011.

## 1.7 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual secara umum dapat diartikan sebagai awal pemikiran dasar yang digunakan sebagai acuan dalam memecahkan suatu permasalahan. Kerangka konseptual yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah demokratisasi.

### 1.7.1 Demokrasi dan Demokratisasi

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani *Demokratia* "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata *demos* berarti "rakyat" dan *kratos* "kekuasaan". Demokrasi yang berkembang saat ini, merupakan sebuah perkembangan dari proses demokrasi abad ke-6 sampai abad ke-3 sebelum masehi dari peradaban Yunani Kuno.<sup>26</sup>

Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang kekuasaannya berada di tangan orang banyak (rakyat). Aristoteles juga berpendapat bahwa landasan negara demokratis adalah kebebasan dan keadilan, dimana setiap orang secara bergantian wajib diperintah dan memerintah. Untuk memerintah suatu negara dapat dilakukan dengan undian (*voting*) berdasarkan kualifikasi-kualifikasi tertentu.<sup>27</sup>

Menurut *Universal Declaration on Democracy* yang diadakan di Cairo pada tanggal 16 September 1997 menyebutkan beberapa elemen-elemen dasar

---

<sup>26</sup> Miriam Budiarjo, hal 109

<sup>27</sup> Aristoteles. *Politik*. dalam Diane Revitch & Abigail Thernstrom. 2005. *Demokrasi : Klasik dan Modern (Tulisan Tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa)*. (Terjemahan : Hermoyo). (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 13-14

mengenai pemerintahan demokratis yaitu pertama, demokrasi yang didasarkan pada keberadaan struktur dan institusi serta keseimbangan kekuasaan antara tiga badan dalam pemerintahan demokratis yaitu : legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kedua, institusi pengadilan yang mandiri, adil dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari siapapun. Ketiga, sebuah sistem pluralistik terhadap partai dan organisasi dalam masyarakat untuk menghindari adanya dominasi satu partai dalam pemerintahan. Kemudian adanya sebuah pemilu yang adil serta penghormatan terhadap HAM misalnya kebebasan berekspresi, terlibat dalam pembuatan kebijakan publik tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. Selanjutnya adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan dan media massa yang bebas, mandiri dan beragam.<sup>28</sup>

Kemudian, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demokratisasi dianggap sebagai proses menuju demokrasi, dimana demokratisasi merupakan sebuah proses yang mengarah pada sistem pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan berkurangnya keotoriteran dalam mengatur masyarakat.<sup>29</sup>

Selanjutnya dalam buku yang berjudul *Democratization : A Critical Introduction* yang ditulis oleh Jean Grugel mengemukakan sebuah kerangka alternatif dalam membahas demokratisasi yang terjadi dalam sebuah negara. Grugel dalam kerangka alternatifnya ini menggunakan tiga konsep kunci dalam menjelaskan demokratisasi yaitu negara, masyarakat sipil dan aktor internasional. Tiga konsep ini merupakan pihak-pihak yang saling melengkapi dan mempengaruhi dalam proses konsolidasi maupun transisi demokrasi atau mereka

---

<sup>28</sup>Inter-Parliamentary Council, *Universal Declaration on Democracy* (Cairo: Inter-Parliamentary Council, 1997), hal IV

<sup>29</sup> Boutros Boutros-Ghali, *An Agenda for Democratization*, (New York : United Nation, 1996), hal 1.

juga bisa dikatakan sebagai aktor kunci dalam demokratisasi yang terjadi di suatu negara. Negara, masyarakat sipil dan aktor internasional ini merupakan struktur-struktur penting dalam perpolitikan suatu negara yang mempunyai kekuatan dalam menyebarkan ide-ide atau kepentingan politik.

#### **A. Demokratisasi dan Negara**

Negara juga merupakan suatu *instrument* yang bisa melakukan hegemoni dalam masyarakat serta merupakan perwujudan dan dasar bagi kekuatan politik.<sup>30</sup>

Dalam demokratisasi, negara memiliki peranan yang sangat penting dalam proses ini karena negara adalah aktor yang mempunyai kepentingan sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat terjadinya demokratisasi, negara sebagai aktor dengan kepentingannya bisa saja menghalangi proses demokratisasi yang sedang terjadi atau negara juga bisa dijadikan sebagai pihak yang mendukung demokratisasi. Kemudian kapasitas politik yang dimiliki negara juga memainkan peranan dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan dalam demokratisasi yang dilakukan oleh suatu pemerintahan.<sup>31</sup>

Negara bisa mengeluarkan kebijakan untuk mendukung demokratisasi atau menghalangi demokratisasi yang terjadi dengan melakukan perlawanan misalnya menangkap tokoh-tokoh pendukung demokrasi, seperti yang terjadi di Myanmar. Walaupun pada awalnya pemerintah melakukan penangkapan dan penindasan kepada tokoh-tokoh pro demokrasi tapi pada akhirnya pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan sebagai keseriusan untuk memulai demokratisasi dalam sistem pemerintahannya.

---

<sup>30</sup>*Theories of Democratization* dalam Jean Grugel, *Democratization : A Critical Introduction*, ( New York : Palgrave, 2002), hal 65-66.

<sup>31</sup>*Ibid*, hal 66

Negara yang sedang melaksanakan demokratisasi harus melakukan perubahan-perubahan dalam menjalankan pemerintahan dan perwakilan dalam pemerintahannya. Demokratisasi pada tingkat negara merupakan kombinasi antara perubahan kelembagaan (bentuk pemerintahan), perubahan perwakilan (siapa yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan untuk siapa negara bertanggung jawab) dan perubahan fungsional (apa yang dilakukan negara atau cakupan tanggung jawab negara). Dalam memahami demokratisasi pada zaman sekarang, perhatian hanya difokuskan pada perubahan kelembagaan daripada perubahan perwakilan dan fungsional, karena apabila perubahan kelembagaan telah dilakukan menuju pemerintahan demokratis maka perubahan pada perwakilan dan fungsional akan mengikuti dengan sendirinya.<sup>32</sup>

Beberapa perubahan kelembagaan yang paling utama yang harus dilakukan oleh sebuah negara menuju demokratisasi adalah mengatur ulang tentang pemilu, pengembangan sistem kepartaian, pemimpin politik dan penerapan sistem parlemen atau sistem presidential di negaranya.<sup>33</sup>

#### 1. Mengatur Ulang tentang Pemilu

Pemilu merupakan wadah bagi masyarakat untuk melakukan kompetisi untuk mendapatkan kekuatan politik atau cara untuk membuat keputusan bersama untuk memilih siapa yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan.<sup>34</sup> Salah satu indikator dari sistem demokrasi adalah dengan adanya pemilu yang bebas. Pemilu dianggap merupakan langkah awal dalam menciptakan sistem negara yang demokratis. Bantuan internasional untuk demokratisasi juga banyak berfokus pada

---

<sup>32</sup> *Democratization and the State*, dalam Jean Grugel, *Democratization : A Critical Introduction*, ( New York : Palgrave, 2002), hal 69-70.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Eric Bjornlund, "Elections and Democratic Transitions," , (diakses 24 Mei 2015), hal 2.

penciptaan pemilihan yang bebas. Demokratisasi digambarkan sebagai pengenalan kebebasan dalam masyarakat yang dapat diwujudkan melalui banyaknya masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilu dan kompetisi banyak partai dalam pemilu (pemilihan multipartai). Lebih lanjut, kebebasan dan pemilihan yang demokratis juga sering dijadikan bukti telah terjadinya demokratisasi yang berlainan dengan sistem pemerintahan otoriter. Kemudian pemilu ini juga digunakan sebagai mekanisme untuk memilih elit politik sesuai dengan ketentuan dari konstitusi yang berlaku di negara tersebut.<sup>35</sup>

## 2. Pengembangan Sistem Kepartaian

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara yang merupakan sebuah organisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.<sup>36</sup> Dalam demokrasi, partai politik memiliki andil dan peranan yang besar terhadap hubungan masyarakat dengan politik, dari partai politik inilah masyarakat dapat terhubung dengan akses politik misalnya kebebasan untuk membentuk sebuah partai yang akan berpartisipasi dalam pemilu. Partai politik juga merupakan sebuah representasi dari budaya demokrasi. Sehingga pemilu yang demokratis adalah pemilu yang ditandai dengan adanya kompetisi yang efektif antar partai politik dan bersaing secara sehat, dinamis dalam arena politik dalam mencapai sebuah perubahan. Pengembangan sistem kepartaian ini penting bagi demokratisasi yang sedang terjadi di suatu Negara karena pada masa sebelum

---

<sup>35</sup>Jean Grugel, *Democratization and the State*, hal 71-73.

<sup>36</sup>Prof. Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008) , hal 404.

transisi demokrasi ini pemerintah hanya mengakui satu partai yang berkuasa dan menghambat perkembangan partai lainnya.<sup>37</sup>

### 3. Pemimpin Politik

Demokrasi mengharuskan pembatasan konstitusi pada kekuasaan dari seorang pemimpin politik disuatu negara. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mencegah terjadinya monopoli kekuasaan oleh seorang pemimpin politik. Konstitusi demokratis juga membuat suatu mekanisme bagi pemilihan pemimpin baru dan cakupan-cakupan kekuasaan yang bisa dia terima.<sup>38</sup>

### 4. Sistem Parlementer atau Sistem Presidential

Setelah mengatur ulang sistem pemilu, pengembangan sistem kepartaian dan pimpinan politik, perubahan kelembagaan yang harus dipenuhi oleh negara selanjutnya adalah penerapan sistem pemerintah parlementer atau presidensial dalam dalam negara demokrasi tersebut. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para akademisi politik mengenai hal ini. Beberapa ahli menilai bahwa sistem parlementer lebih kuat daripada sistem presidential karena sistem presidensial dikawatirkan menciptakan dualisme legitimasi, yang mana antara presiden dan parlemen saling mengklaim dirinya mendapatkan legitimasi terbanyak. Hal ini cukup beralasan, karena legitimasi merupakan faktor yang penting dalam menjalankan sebuah kekuasaan. Tanpa adanya legitimasi maka jalannya pemerintahan tersebut dapat kita katakan tidak sah karena tidak didukung oleh masyarakat mayoritas.

Sistem presidensial juga dinilai tidak fleksibel dan menuai kritikan karena lebih condong memunculkan satu partai yang dominan dalam pemerintahan. Hal

---

<sup>37</sup> Jean Grugel, hal 73-75

<sup>38</sup> Jean Grugel, hal 75.

ini dapat mengurangi esensi dari fungsi partai lain dalam sistem multipartai. Sehingga ini dikhawatirkan menciptakan kecemburuan politik bagi partai lain karena merasa kurang mendapatkan porsi kewenangan di pemerintahan. Akibatnya, sistem presidensial dinilai tidak stabil karena adanya pertentangan yang muncul dari partai lain karena faktor dominasi salah satu partai di pemerintahan. Namun, di belahan dunia yang lain seperti Amerika Latin kebanyakan mereka menerapkan sistem presidensial. Hal ini dikarenakan adanya persepsi bahwa adanya kepemimpinan presiden yang kuat akan berdampak pada stabilitas pemerintahan negara. Perdebatan tentang sistem pemerintahan ini banyak ditemui dalam negara yang sedang mengalami transisi menuju demokrasi. Kesimpulannya adalah baik sistem presidensial maupun parlementer keduanya merupakan pusat dari stabilitas dan perkembangan dalam sistem demokrasi, kedua sistem ini dapat bekerja secara demokrastik ketika di dukung oleh norma-norma yang ditetapkan oleh konstitusi.<sup>39</sup>

Pada penelitian ini perubahan kelembagan yang harus dilakukan oleh sebuah negara dalam memulai demokratisasi akan digunakan sebagai gambaran awal dalam melihat kesesuaian dan penerapan isi kebijakan *seven step roadmap to discipline-flourishing democracy* dalam mewujudkan perubahan kelembangaan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan demokrasi di Myanmar.

## **B. Demokratisasi dan Masyarakat Sipil**

Dalam bukunya, Jean Grugel mengemukakan bahwa masyarakat sipil mengacu pada ruang diantara negara dan individu yang terdiri dari lembaga-

---

<sup>39</sup> Ibid, hal 75-76

lembaga sosial politik, asosiasi sukarela dan ruang publik dimana masyarakat dapat berdebat, bertindak dan terlibat satu sama lain dalam berhubungan dengan negara.<sup>40</sup> Richard Halloway mengemukakan bahwa masyarakat sipil adalah sektor ketiga dari masyarakat selain pemerintah dan bisnis. Mereka mengorganisasikan diri secara suka rela, terikat oleh nilai-nilai yang mereka yakini bersama untuk mencapai suatu keuntungan yang tidak berkaitan dengan politik atau kekuasaan tapi lebih fokus terhadap upaya dalam perbaikan kehidupan, contohnya gerakan warga negara, serikat buruh, koperasi dan LSM.<sup>41</sup>

Masyarakat sipil mulai muncul di dalam masyarakat setelah terjadinya protes sosial dan kekacauan politik pada 1960an. Gerakan anti sistem atau kelompok anti kapitalis yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat menjadi titik awal konflik dan protes dalam politik yang terjadi di dunia. Pergerakan masyarakat sipil lama-lama makin meluas dengan adanya demonstrasi yang dipimpin oleh mahasiswa, buruh yang melakukan pemogokan kerja, perjuangan gender, perjuangan etnis dan kegiatan berbasis masyarakat lainnya.<sup>42</sup>

Selanjutnya, masyarakat sipil menjadi istilah yang sering digunakan untuk kegiatan sosial atau organisasi kemasyarakatan yang secara langsung atau tidak langsung memberikan dukungan dan mempromosikan demokrasi. Masyarakat sipil telah muncul dalam perjuangan menuju demokrasi sejak tahun 1970an. Mereka mampu mempengaruhi transisi demokrasi dan mampu memainkan peran

---

<sup>40</sup> Jean Grugel, *Democratization : A Critical Introduction*, ( New York : Palgrave, 2002) hal 93

<sup>41</sup> Aga Khan Development Network, "Enhancing the Competence and Sustainability of High Quality CSOs in Kenya", (Report of an Exploratory Study Commissioned, May 2007), hal 11

<sup>42</sup> Jean Grugel, hal 93

dalam membentuk sistem politik yang baru yaitu demokrasi misalnya dengan aksi demonstrasi, pemogokan kerja, perjuangan gender dan lainnya.<sup>43</sup>

Dalam kasus Myanmar, pergerakan masyarakat sipil akan peneliti fokuskan pada perjuangan Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh pro demokrasi lainnya seperti mahasiswa dan tokoh-tokoh pro demokrasi yang berada di pengasingan di luar negara Myanmar serta demonstrasi yang dilakukan oleh biksu dalam upaya mereka mewujudkan demokrasi di Myanmar .

### C. Demokratisasi dan Aktor Internasional

Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi dan perkembangan informasi yang sangat cepat bahkan mengaburkan batas-batas wilayah telah membantu penyebaran sistem demokrasi ke seluruh dunia. Penyebaran demokrasi yang beriringan dengan globalisasi ini membuat banyak negara yang tidak bisa menutup diri atau menghindari perubahan-perubahan yang ditawarkan oleh demokrasi dan globalisasi. Penyebaran informasi dan akses yang lebih mudah terhadap informasi membuat masyarakat bisa saling terhubung dan mendapatkan informasi apapun dari belahan dunia manapun. Sehingga hal ini bisa mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat ataupun negara. Tuntutan perubahan politik, keadilan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan yang terjadi di suatu negara dengan cepat menyebarkan pengaruhnya ke negara lain yang merupakan salah satu contoh dari globalisasi.

Penyebaran nilai-nilai demokrasi melalui globalisasi ini tidak terlepas dari keinginan untuk menciptakan sebuah landasan politik dan global order yang menggunakan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM.

---

<sup>43</sup> Ibid

Dalam bukunya Jean Grugel berpendapat bahwa penyebaran demokrasi ini dapat dilakukan oleh beberapa aktor internasional misalnya negara-negara Barat dan lembaga-lembaga pemerintahan global. Dalam penyebaran demokrasi melalui globalisasi, negara-negara Barat ini membentuk sebuah ekonomi politik global yang berkaitan dengan proses untuk memperdalam pengaruh dan kontrol negara Barat terhadap negara berkembang, dimana ide demokrasi memang mulai dikembangkan dan diterapkan dinegara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Penyebaran demokrasi ini juga merupakan strategi dalam menciptakan liberalisasi politik dan ekonomi dan pasar bebas dan penurunan kontrol negara dalam perekonomian dan politik.<sup>44</sup>

Selain negara-negara Barat, lembaga-lembaga pemerintahan global juga berperan penting dalam penyebaran demokrasi. Lembaga-lembaga pemerintahan global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Bank* atau *World Trade Organization* (WTO) dalam mempromosikan demokrasi lebih menggunakan kebijakan-kebijakan yang bersifat persuasif atau ajakan dan persyaratan. Bantuan rezim yang banyak mereka berikan sejak tahun 1990 telah menjadi alat dalam mempromosikan demokrasi secara global. Lembaga-lembaga ini kadang memberikan kriteria-kriteria politik tertentu sebelum memberikan bantuan rezim seperti bantuan ekonomi untuk pembangunan negara.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat promosi demokrasi yang dilakukan oleh negara lain dalam hal ini adalah Amerika Serikat karena Amerika Serikat adalah negara tujuan ekspor terbesar kedua produk-produk Myanmar seperti garmen, dan negara-negara di Uni Eropa karena kedekatan negara

---

<sup>44</sup> Ibid, hal 116-118

<sup>45</sup> Ibid, 129-130

Myanmar dengan Uni Eropa sebagai negara bekas jajahan Inggris. Amerika Serikat dan Uni Eropa juga merupakan negara-negara yang telah aktif mempromosikan demokrasi keseluruhan dunia sejak tahun 1961. Kemudian, penelitian ini juga akan melihat promosi demokrasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan global seperti PBB yang merupakan organisasi pemerintahan yang anggotanya hampir meliputi seluruh negara di dunia dan ASEAN sebagai satu-satunya organisasi di kawasan Asia Tenggara dalam mempromosikan demokrasi di Myanmar.

Secara umum, konsep demokratisasi dari Jean Grugel ini akan peneliti gunakan untuk menganalisis bagaimana demokratisasi yang terjadi di Myanmar yang dilihat dari tiga aspek utama yaitu perubahan kelembagaan yang harus dilakukan oleh negara yang akan memulai demokratisasi, perjuangan masyarakat sipil dan promosi-promosi demokrasi yang dilakukan oleh aktor-aktor internasional dalam mendorong terwujudnya demokrasi di Myanmar.

### **1.8 Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan bentuk pemaparan deskriptif-analisis. Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan suatu fenomena secara *riil* dan apa adanya.<sup>46</sup> Bentuk pemaparan deksripsif analisis digunakan untuk mendapatkan pengetahuan secara lebih mendalam. Pemaparan ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang telah maupun yang sedang terjadi dengan menggunakan data yang deskriptif berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel-artikel agar dapat lebih memahami secara

---

<sup>46</sup>Kartini, Kartono, *Metodologi Riset*, (Bandung, CV.Mandar Maju, 1990), hal 62

mendalam kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti.

### **1.8.1 Batasan Masalah**

Dalam memfokuskan penelitian ini penulis memberikan batasan waktu yaitu pada tahun 2003-2011, pemilihan batasan waktu ini berdasarkan bahwa pada tahun 2003 terjadi peristiwa penyerangan terhadap Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh pro demokrasi lainnya yang sedang melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Myanmar, setelah itu batasan akhir penelitian tahun 2011, dikarenakan pada tahun ini Myanmar telah berhasil melakukan peralihan kekuasaan kepada sipil yang ditandai dengan dibentuknya pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Presiden Thein Sein. Peneliti juga akan menambahkan literatur sejarah guna menjelaskan dinamika politik dalam pemerintah Myanmar dan peristiwa-peristiwa lain pendorong demokratisasi di Myanmar sebelum tahun 2003.

### **1.8.2 Tingkat Analisis dan Unit Analisis**

Sebelum menentukan tingkat analisis dalam suatu penelitian terlebih dahulu perlu dilakukan penetapan terhadap unit analisis dan unit ekplanasi. Unit analisis adalah unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan dan diramalkan. Sedangkan unit ekplanasi adalah unit yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan.<sup>47</sup> Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara yaitu Myanmar sedangkan unit ekplanasinya adalah demokratisasi yang terjadi di Myanmar. Selanjutnya tingkat analisis merupakan level dimana unit analisis akan

---

<sup>47</sup> Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta : LP3ES, 1990), hal 35-39

dianalisis.<sup>48</sup> Pada penelitian ini tingkat analisa yang digunakan adalah pada tingkat sistem internasional.

### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik untuk mencari dan mengumpulkan data terkait permasalahan yang akan diteliti. Pencarian informasi dan data dilakukan dengan membaca sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan tema dan rumusan masalah yang dipaparkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan data-data sekunder, yakni data-data dan informasi yang secara keseluruhan diambil dari temuan-temuan yang telah dihasilkan pihak lain sebelumnya seperti buku, jurnal ilmiah dan laporan penelitian yang digunakan sebagai alat bukti dalam mengumpulkan fakta-fakta untuk mendukung penelitian ini. Selain itu, data-data juga diperoleh melalui situs-situs berita internasional dan surat kabar nasional.

### 1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Data-data sekunder yang dikumpulkan melalui *library research* ini kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori atau konsep-konsep yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Data-data atau informasi yang paling relevan dengan penelitian ini selanjutnya diolah melalui prosedur kualitatif yaitu menetapkan, megurangaikan dan mendokumentasikan alur sebab akibat dalam pengetahuan yang sedang dipelajari. Hal ini digunakan untuk menemukan dan menilai ide-ide atau makna-makna yang terkandung di dalam data-data yang tersedia agar dapat mendukung pengetahuan yang sedang diteliti oleh penulis.

---

<sup>48</sup>Ibid

### 1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang membagi proses ini menjadi tiga tahap, yaitu<sup>49</sup>

1. Proses reduksi data yang bertujuan untuk memilih, menggolongkan dan mengorganisasikan data. Data-data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada tersebut direduksi dengan menilai data-data mana saja yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini dan data-data mana saja yang tidak relevan dengan konteks dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini.
2. Proses penyajian data. Dalam proses ini data-data yang telah dikumpulkan dianalisa menggunakan kerangka konseptual demokratisasi yang dikemukakan oleh Jean Grugel. Dalam konsep ini Jean Grugel mengemukakan bahwa ada tiga aktor yang saling melengkapi dan mempengaruhi dalam demokratisasi yang terjadi di suatu Negara yaitu negara, masyarakat sipil dan aktor internasional. Sehingga peneliti akan melihat bagaimana proses demokratisasi yang terjadi di Myanmar pada tahun 2003-2011 berdasarkan peran dari ketiga aktor tersebut.
3. Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah pengaplikasian konsep maka diperoleh hasil penelitian yang kemudian diverifikasi kembali dengan pertanyaan penelitian, apakah berhasil menjawab pertanyaan tersebut atau tidak.

---

<sup>49</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal 209-210

## **1.9 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab I merupakan pengantar yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menggambarkan secara keseluruhan tentang permasalahan yang diteliti.

### **BAB II Kondisi Demokrasi di Myanmar**

Bab II akan menjelaskan mengenai demokrasi dan perkembangannya dalam hubungan internasional dan kondisi demokrasi yang pernah terjadi di Myanmar

### **BAB III Dinamika Politik dalam Pemerintahan Myanmar**

Bab III akan menjelaskan bagaimana kondisi dan perubahan- perubahan serta gejolak-gejolak politik yang terjadi di Myanmar dan menjelaskan upaya-upaya apa saja yang pernah dilakukan gerakan oposisi, masyarakat Myanmar dan pemerintahan junta militer dalam mewujudkan demokrasi di Myanmar sebelum tahun 2003

### **BAB IV Analisis Demokratisasi yang terjadi di Myanmar tahun 2003-2011**

Dalam bab IV akan menjelaskan demokratisasi yang terjadi di Myanmar pada tahun 2003-2011 dengan merujuk pada konsep demokratisasi yang disampaikan oleh Jean Grugel.

### **Bab IV Penutup**

Bab IV berisi kesimpulan dan saran dari penelitian ini.